

---

---

## **Kewirausahaan Politik Walikota Surakarta dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark**

**Purnanda Yusuf Abdillah**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
(Email: ysf.purnanda@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to capture the practice of political entrepreneurship in human resource development efforts undertaken by Surakarta Mayor Gibran Rakabuming Raka. This research is important for expanding studies in the field of Political Science related to the practice of political entrepreneurship in Indonesia, particularly at higher levels. Political entrepreneurship actions are carried out through the utilization of authority in the form of resource allocation by political actors to generate profits and create maximum public benefits. By borrowing the alertness and discovery branch of thought in the theory of political entrepreneurship developed by McCaffrey and Salerno (2011), this study seeks to analyze the actions of political actors in presenting public benefits through the revitalization policy of the Solo Technopark Science and Technology. This research was qualitative, using a case study method through data collection in the form of interviews, documentation, literature study, and observation. The results showed that the Mayor of Surakarta is sensitive in seeing global challenges and answering these challenges through a solution that is ultimately able to bring benefits to the people in Surakarta City. The findings of this study show one side of the characteristics, that the practice of political entrepreneurship carried out at a higher level is able to produce greater benefits and benefits for the community and also political actors.

### **Keywords:**

political entrepreneurship; human resource development; Surakarta; Solo technopark

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memotret praktik kewirausahaan politik dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang dijalankan oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini penting untuk memperluas kajian dalam ranah ilmu politik terkait praktik kewirausahaan politik di Indonesia, khususnya pada level yang lebih tinggi. Tindakan kewirausahaan politik dijalankan melalui pemanfaatan wewenang berupa alokasi sumber daya yang dimiliki oleh aktor politik untuk menghasilkan keuntungan serta menciptakan manfaat publik sebesar-besarnya. Dengan meminjam cabang pemikiran *alertness and discovery* dalam teori kewirausahaan politik yang dikembangkan oleh McCaffrey dan Salerno (2011), penelitian ini berupaya untuk menganalisis tindakan aktor politik dalam menghadirkan manfaat publik melalui kebijakan revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus melalui pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota Surakarta memiliki kepekaan dalam melihat tantangan global dan menjawab tantangan tersebut melalui sebuah solusi yang ujungnya mampu menghadirkan kebermanfaatannya bagi masyarakat di Kota Surakarta. Temuan studi ini menunjukkan satu sisi karakteristik, bahwa

praktik kewirausahaan politik yang dijalankan pada level lebih tinggi mampu menghasilkan manfaat dan keuntungan secara lebih besar bagi masyarakat sekaligus aktor politik.

### **Kata Kunci:**

kewirausahaan politik; pengembangan sumber daya manusia; Surakarta; Solo technopark

### **Pendahuluan**

Penelitian terkait tema kewirausahaan politik mulai banyak dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Kewirausahaan politik mengacu pada tindakan yang dijalankan oleh aktor politik berdasarkan kepekaan terhadap isu dan tantangan yang tengah muncul di dalam masyarakat. Tindakan tersebut dijalankan melalui pemanfaatan wewenang berupa alokasi sumber daya yang dimiliki oleh aktor politik. Kewirausahaan politik dijalankan untuk menciptakan sebesar-besarnya manfaat bagi publik. Namun, di sisi lain kewirausahaan politik juga tidak terlepas dari adanya orientasi pada keuntungan-keuntungan yang dapat diraih oleh aktor politik. Beberapa tahun belakangan, cukup banyak studi yang dilakukan berfokus pada praktik kewirausahaan politik pada tingkat pemerintahan desa. Masih sedikit kajian yang mencoba untuk memotret bagaimana praktik kewirausahaan politik dijalankan pada level yang lebih tinggi, khususnya pada level kota atau kabupaten. Padahal, praktik kewirausahaan politik di level kota atau kabupaten juga memiliki dinamika dan implikasinya tersendiri. Hal tersebut dapat berupa cakupan dari dampak kewirausahaan politik yang semakin luas, penerima manfaat yang lebih banyak, dan keuntungan bagi aktor kewirausahaan politik yang lebih besar.

Beberapa studi seputar kewirausahaan politik telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu dimana fokus studi berada di level desa. Temuan umum dari studi sebelumnya mengonfirmasi bagaimana kepala desa sebagai aktor politik penting dalam mempraktikkan kewirausahaan politik (Adimasurya, 2018; Darmawan, 2019; Sobari, 2019). Penelitian Adimasurya (2018), misalnya, menemukan bahwa meskipun kepala desa bukanlah pencetus utama ide kewirausahaan politik namun Kepala Desa Karanganyar di Kabupaten Trenggalek adalah salah satu pelopor yang mengakomodir dan menggabungkan semua kelompok masyarakat guna menyukseskan agenda-agenda Desa Karanganyar. Selanjutnya, penelitian Darmawan (2019) juga menemukan bagaimana Kepala Desa Ngroto menerapkan praktik kewirausahaan politik khususnya melalui cabang pemikiran *public choice* yang terlihat dari keberhasilannya membangun desa dalam 3 indikator Indeks Desa Membangun, diantaranya Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Adapun studi Sobari (2019) yang mengkaji praktik kewirausahaan politik dari kepala desa di salah satu pedesaan Jawa menemukan bahwa praktik kewirausahaan politik memiliki keterkaitan dengan budaya Jawa serta nilai-nilai agama (Islam) di pedesaan Jawa. Dengan kata lain, salah satu faktor keberhasilan praktik kewirausahaan politik dapat dijalankan oleh kepala desa adalah adanya pengaruh dari budaya dan nilai-nilai agama. Sehingga menjadikan masyarakat desa dapat menerima praktik kewirausahaan politik sekaligus turut menghadirkan keuntungan bagi aktor kewirausahaan politik.

Berdasarkan *review* terhadap studi sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk memperluas kajian kewirausahaan politik yang ada di Indonesia, khususnya pada level kota atau kabupaten. Secara spesifik, peneliti berfokus pada praktik kewirausahaan politik yang dijalankan oleh Walikota Surakarta dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui, pasca pemilihan umum kepala daerah pada tahun

2020, tonggak kepemimpinan Walikota Surakarta beralih dari FX Hadi Rudyatmo kepada Gibran Rakabuming Raka. Melalui kepemimpinannya, Walikota Gibran mencanangkan berbagai program kerja dalam upaya untuk memperkuat daya saing daerah serta guna mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di Kota Surakarta. Salah satu upaya tersebut dijalankan lewat kebijakan revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagai satu dari 17 titik prioritas pembangunan Kota Surakarta periode 2021-2026. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusia melalui otoritasnya. Keberhasilan dari inovasi daerah tentu akan menyumbang keberhasilan pada program inovasi nasional. Selain itu, keberhasilan inovasi pada tingkat daerah juga turut mempercepat pemerataan pembangunan yang kemudian memberi dampak pada ketercapaian pembangunan nasional.

Melalui amanat dan wewenang Undang-undang, Pemerintah Kota Surakarta mengambil inisiatif dalam upaya pembangunan serta pengembangan sumber daya manusia lewat revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Kawasan Science Techno Park di Kota Surakarta memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdiri pada tahun 2002 sebagai Surakarta Competency and Technology Center (SCTC), kemudian SCTC beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark di tahun 2009 pada masa kepemimpinan Walikota Joko Widodo. Akan tetapi, progres pembangunan dan pengembangan Solo Technopark menemui beragam kendala yang pada ujungnya menyebabkan pengembangan menjadi terhambat dan tidak berjalan maksimal. Faktanya, daya saing Indonesia di kancah global pun masih belum matang. Berdasarkan hasil survei yang dihimpun oleh Institute for Management Development (IMD), *World Competitiveness Ranking* tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 37 dari 64 negara. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu, sektor digital Indonesia lebih memprihatinkan dengan posisinya pada peringkat tiga terendah di Asia. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa daya saing global Indonesia masih belum matang. Untuk menghadapi tantangan berupa pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin massif, maka tidak ada pilihan selain menciptakan iklim yang mampu mendorong akselerasi pengembangan sumber daya manusia. Celah inovasi tersebut dilihat sebagai peluang oleh Walikota Gibran untuk kembali mendayagunakan kawasan Solo Technopark yang juga merupakan bagian dari agenda nasional dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, dijalankan pula beberapa perombakan terkait program dan aktivitas pengembangan yang ditujukan untuk menjawab tantangan dari pesatnya perkembangan global.

Revitalisasi kawasan Solo Technopark merupakan bagian dari kebijakan inovatif sebagai praktik kewirausahaan politik Walikota Gibran. Tujuan dari kebijakan revitalisasi ini tidak lain ialah untuk menghadirkan *public value* bagi masyarakat di Kota Surakarta. Di sisi lain, konsep kewirausahaan politik juga tidak terlepas dari terbukanya peluang kesempatan yang menghadirkan keuntungan bagi aktor kewirausahaan politik. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana praktik kewirausahaan politik Walikota Surakarta dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dijalankan. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana praktik kewirausahaan politik Walikota Surakarta berjalan dan bagaimana *output* praktik kewirausahaan politik tersebut dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.

## **Tinjauan Kepusatakaan Memahami Kewirausahaan Politik**

Secara sederhana, kewirausahaan politik merupakan perpaduan dari dua komponen ilmu sosial, yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik. Sebagai salah satu cabang ilmu yang diturunkan dari ilmu ekonomi, kewirausahaan didefinisikan sebagai proses untuk menciptakan sekaligus mengejar peluang berdasarkan sumber daya yang dikuasai atau dikendalikan (Mintardjo, dkk., 2020). Bertolak dari gagasan tersebut, Matthew McCaffrey dan Joseph T. Salerno (2011) kemudian memperluas makna dan praktik kewirausahaan yang mulanya hanya bergerak dalam fungsi ekonomi kepada fungsi dan praktik di dalam ranah politik. Kewirausahaan politik mengacu pada tindakan yang dijalankan oleh aktor politik melalui pemanfaatan kewenangan berupa alokasi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan sebesar-besarnya manfaat bagi publik. Aktor kewirausahaan politik adalah individu yang memiliki akses terhadap kepemilikan sumber daya dan tidak tergantung pada perintah dari atasan. Dengan demikian, pejabat publik sebagai pemangku kepentingan dan pemilik kuasa tertinggi atas alokasi sumber daya yang mereka kuasai merupakan aktor utama dari praktik kewirausahaan politik.

McCaffrey dan Joseph T. Salerno (2011) juga menjabarkan terkait tiga cabang pemikiran utama dari kewirausahaan politik. Cabang-cabang pemikiran tersebut merupakan landasan yang dapat digunakan untuk melihat proses terciptanya praktik kewirausahaan politik dari aktor kewirausahaan politik. Pertama, cabang pemikiran *public choice*, menggambarkan aktor kewirausahaan politik sebagai individu yang memiliki kepekaan terhadap kesempatan dalam memanfaatkan suatu sistem politik. Namun, tidak jarang juga hadirnya peluang dari kekuasaan atas sumber daya ini justru disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kepentingan pribadi para pejabat publik. Kedua, cabang pemikiran *alertness and discovery* yang dikembangkan dari buah pemikiran dalam bidang kewirausahaan oleh ekonom Amerika Serikat, Israel Kirzner. Cabang ini menempatkan seorang aktor kewirausahaan politik sebagai individu yang memiliki empati dan kepekaan (*alertness*) terhadap masalah yang timbul di dalam kehidupan masyarakat. Berbekal empati dan kepekaan tersebut, aktor kewirausahaan politik menyusun, menemukan, atau menciptakan sebuah inovasi kebijakan guna mengatasi permasalahan yang timbul (*discovery*). Ketiga, cabang pemikiran *new institutionalism* yang merupakan penggabungan dari pemikiran *public choice* dan *alertness and discovery*. Cabang ini menekankan pada peran aktor kewirausahaan politik dalam upaya menciptakan solusi inovatif yang pada akhirnya turut mengubah institusi politik melalui aktivitas-aktivitas politiknya. Penelitian ini merupakan analisis praktik kewirausahaan politik dari Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang cenderung menempatkan posisinya sebagai aktor politik pada cabang pemikiran kedua dari penjabaran tersebut.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi faktor terbesar sebagai modal mewujudkan negara yang berkemajuan. Melalui manusia yang berkualitas, buah pemikiran kreatif dan inovatif hadir untuk membenahi setiap aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, pengembangan dalam tujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kehidupan yang berkemajuan, dan tatanan masyarakat yang harmonis mutlak untuk dijalankan. Menurut Kwik Kian Gie (dalam Ruhana, 2012), sudah selayaknya pemerintah Indonesia memperkuat investasi pada pengembangan sumber

daya manusia. Hal ini dimaksudkan guna memenuhi hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Selain itu, upaya pengembangan sumber daya manusia juga turut memperkokoh kekuatan bagi pertumbuhan perekonomian dan menjaga keberlangsungan hidup demokrasi dalam jangka waktu yang panjang. Urgensi pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi semakin penting di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi dunia. Pasalnya, kepemilikan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas akan berdampak secara langsung terhadap kekuatan daya saing Indonesia di kancah global. Apabila melihat realita, tampaknya Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam menghadirkan sumber daya manusia berkualitas. Dengan demikian, memaksimalkan upaya pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional menjadi kunci bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Memahami Konsep Revitalisasi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dan peningkatan fungsi kawasan sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut, revitalisasi dijalankan tidak lain untuk menghidupkan atau memvitalkan kembali kawasan yang dulunya aktif, akan tetapi seiring berjalannya waktu mengalami kemunduran. Revitalisasi perlu mendukung adanya perbaikan pada aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Atas hal tersebut, maka revitalisasi haruslah berorientasi pada kepentingan umum untuk menghadirkan seluas-luasnya manfaat publik. Menurut Laretna, revitalisasi juga hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat yang bukan hanya sekedar formalitas. Akan tetapi, masyarakat perlu memiliki andil berupa partisipasi dalam menyukseskan revitalisasi suatu kawasan.

Upaya meningkatkan vitalitas kawasan melalui revitalisasi dapat berwujud banyak hal, diantaranya seperti penataan ulang lahan maupun bangunan, peningkatan nilai sosial dan ekonomi lewat renovasi kawasan serta bangunan, peningkatan intensitas pemanfaatan lahan beserta lingkungan, dan rehabilitasi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kawasan. Adapun tujuan utama yang ingin diwujudkan dari revitalisasi diantaranya ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil, terintegrasinya kawasan dengan sistem kota, terciptanya kawasan yang layak huni, pemerataan keadilan sosial, dan lain sebagainya. Selain adanya tujuan yang ingin dicapai, terdapat pula beragam sasaran-sasaran dari dilaksanakannya revitalisasi. Sasaran tersebut diantaranya seperti peningkatan intensitas program pengembangan dan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas kawasan serta jumlah usaha, tercapainya peningkatan nilai properti kawasan, peningkatan kualitas hidup serta kenyamanan, dan semakin memudahinya prasarana lingkungan hidup.

### **Metodologi**

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dan berupaya untuk menganalisis tindakan Walikota Surakarta sebagai aktor kewirausahaan politik dalam menghadirkan manfaat publik melalui kebijakan revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark dengan meminjam kerangka teori kewirausahaan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperdalam pemahaman terkait fenomena politik kontemporer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan observasi lapangan.

Penelitian ini berfokus pada praktik kewirausahaan politik Walikota Surakarta selaku aktor kewirausahaan politik melalui kebijakan inovatif berupa revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Analisis data dalam penelitian ini dijalankan dengan meminjam model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Revitalisasi Solo Technopark sebagai Program Prioritas Pembangunan Kota Surakarta**

Revitalisasi Solo Technopark menjadi bagian dari program prioritas pembangunan yang dijalankan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Surakarta. Secara jangka panjang, revitalisasi digarap guna memaksimalkan peran serta fungsi Solo Technopark dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing berkelas dunia. Pengembangan sektor ekonomi kreatif memiliki urgensi untuk mewujudkan Kota Surakarta menjadi kota budaya yang modern, kreatif, gesit, tangguh, dan sejahtera di Indonesia. Ke depannya, Solo Technopark diharapkan akan menjadi garda terdepan dalam pusat pengembangan UMKM yang diiringi adanya inovasi digitalisasi. Sehingga, arah perkembangan ekonomi kreatif di Surakarta dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman serta dipersiapkan untuk memperkuat daya saing daerah.

Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD). Pengembangan Solo Technopark pun turut memiliki urgensi sebagai respons dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya sektor-sektor penting pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan Solo Technopark melalui revitalisasi sebagai bagian dari program prioritas diharapkan mampu berkontribusi pada pembangkitan sektor-sektor tersebut, khususnya dalam sektor ekonomi, bisnis, pendidikan dan penelitian, serta industri. Meskipun dijalankan di tengah masa pandemi dan banyaknya permasalahan sosial di Kota Surakarta, keberlanjutan revitalisasi Solo Technopark justru dipandang sebagai suatu program yang memiliki urgensi penting dan perlu dijalankan. Hadirnya masalah-masalah sosial di Surakarta, seperti pendidikan, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya membutuhkan upaya konkret sebagai stimulus penanganan. Oleh karenanya, revitalisasi Solo Technopark mampu menjadi salah satu pintu masuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termarjinalkan melalui program-program pelatihan. Melalui hadirnya pembekalan dari sektor formal dan non-formal, masyarakat termarjinalkan dapat diberdayakan. Sehingga, hal ini mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, bahkan mendorong hadirnya wiraswasta baru yang turut memperluas terciptanya lapangan pekerjaan.

#### **Revitalisasi Solo Technopark sebagai Praktik Kewirausahaan Politik Cabang Pemikiran *Alertness and Discovery***

Salah satu cabang pemikirannya dalam kewirausahaan politik dikembangkan dari penekanan teori kewirausahaan karya Israel Kirzner. Teori tersebut berfokus pada kewirausahaan yang ditekankan kepada sisi sensitivitas dan inovasi dari aktor (*alertness and discovery*). Cabang ini melihat aktor politik sebagai individu yang memiliki empati dan kepekaan terhadap tantangan dan masalah yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Melalui kepekaan tersebut, aktor politik kemudian menyusun, menemukan,

atau menciptakan sebuah inovasi kebijakan guna mengatasi permasalahan yang timbul. Mencermati pesatnya perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin masif, Walikota Gibran menilai bahwa dibutuhkan adanya wadah bagi masyarakat khususnya generasi muda di Kota Surakarta untuk mengembangkan keterampilan serta memaksimalkan potensinya. Kepekaan Walikota Gibran dalam merespons hadirnya tantangan global berupa percepatan perkembangan teknologi dan globalisasi yang akan menciptakan banyak peluang merupakan bentuk dari aktualisasi konsep *alertness* dalam cabang pemikiran kewirausahaan politik.

Kebijakan revitalisasi Solo Technopark tentu erat kaitannya dengan peran aktor politik, yakni Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Semenjak menduduki jabatan kursi walikota setelah memenangkan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020, Gibran Rakabuming Raka membuat beragam gebrakan dengan program-program kerjanya. Walikota Gibran Rakabuming Raka menginisiasi kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan perubahan Kota Surakartamenuju kemajuan dan digitalisasi melalui program-program yang tersusun dalam 17 titik prioritas pembangunan Kota Surakarta periode 2021-2026. Solo Technopark sebagai pusat vokasi dan inovasi di Kota Surakarta menjadi salah satu bagian dari prioritas pembangunan tersebut.

Gagasan revitalisasi dengan mengusung kebaruan dari segi fasilitas dan program diproyeksikan dapat mendorong Solo Technopark semakin maksimal dalam meningkatkan daya saing daerah bagi Kota Surakarta. Walikota Gibran mengharapkan dijalankannya revitalisasi Solo Technopark mampu mendorong terbentuknya wadah pelatihan bagi anak-anak muda, inkubasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk akselerasi naik kelas, dan membentuk ekosistem digital yang baik bagi daerah (Wawancara dengan DC, 2023). Sehingga, sasaran revitalisasi ini terdiri dari dua kelompok. *Pertama*, sasaran revitalisasi Solo Technopark ditujukan bagi siapa pun yang telah menyelesaikan masa studinya dan berkeinginan untuk memasuki dunia kerja. Pada persoalan ini, Solo Technopark berperan dalam memberikan pelatihan dan menjembatani angkatan siap kerja untuk terjun ke industri kerja. *Kedua*, sasaran revitalisasi Solo Technopark ialah siapa pun yang memiliki minat untuk berwirausaha. Akan tetapi, masih terkendala dengan pengetahuan dan informasi terkait kewirausahaan. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan pasca revitalisasi juga turut diarahkan kepada digitalisasi agar sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga, nantinya akan terbentuk ekosistem wirausaha berbasis digital. Dengan demikian, kelompok sasaran revitalisasi ini mampu mendorong adanya peningkatan pada daya saing daerah Kota Surakarta.

McCaffrey dan Joseph T. Salerno (2011), memaparkan bahwa aktor kewirausahaan politik merupakan individu yang tidak jauh berbeda dengan aktor wirausaha dalam bidang ekonomi. Aktor kewirausahaan politik ialah siapa saja yang bisa menunjukkan cara kerja wirausahawan dalam bidang ekonomi ke dalam ranah politik. Mereka memiliki akses terhadap kepemilikan sumber daya dan wewenang untuk mengelolanya. Aktor kewirausahaan politik juga bukanlah seorang *political brokerage* atau *lobbyist*. Dimitrios Christopoulos dan Karin Ingold (2011), memetakan perbedaan antara aktor kewirausahaan politik dan *political broker* dalam tulisannya. Singkatnya, *political broker* hanya berperan sebagai penghubung dalam aktivitas aktor politik yang melibatkan jaringan politik. Perbedaan antara *political broker* dan aktor utama kewirausahaan dalam politik terletak pada kepemilikan modal politik dan kewenangan untuk mengelolanya. Namun, antara aktor

kewirausahaan politik dan *political broker* saling bertautan dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dijalankan. Mengacu pada hal itu, pejabat publik dalam ranah politik yang berperan sebagai pemangku kepentingan dan pemilik kuasa tertinggi atas alokasi sumber daya merupakan aktor utama dari praktik kewirausahaan politik. Pada kaitannya dengan revitalisasi Solo Technopark, maka Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Surakarta berperan sebagai aktor utama praktik kewirausahaan politik.

Revitalisasi Solo Technopark sebagai bagian dari kebijakan Walikota Gibran dalam mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing daerah merupakan praktik kewirausahaan politik yang nyata. Berdasarkan konsep kewirausahaan politik yang dikembangkan oleh McCaffrey dan Joseph T. Salerno, Walikota Gibran menjalankan wewenangnya sebagai pejabat publik dalam menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat. Walikota Gibran menjadikan revitalisasi Solo Technopark sebagai program prioritas pembangunan Kota Surakarta dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik untuk menghadirkan pembangunan yang memiliki manfaat konkret dan dapat dirasakan segera oleh masyarakat. Revitalisasi Solo Technopark relevan sebagai praktik kewirausahaan politik dalam cabang pemikiran kewirausahaan politik yang dikembangkan McCaffrey dan Joseph T. Salerno, khususnya melalui cabang *alertness and discovery* yang diadopsi dari penekanan teori kewirausahaan karya Israel Kirzner.

Kepekaan Walikota Gibran dalam merespon hadirnya tantangan global berupa percepatan perkembangan teknologi dan globalisasi yang akan menciptakan banyak peluang merupakan bentuk dari aktualisasi konsep *alertness* dalam cabang pemikiran kewirausahaan politik. Hal tersebut dinilai oleh Walikota Gibran sebagai persoalan yang krusial bagi generasi muda ke depan, mengingat persaingan tidak hanya terjadi dalam lingkup lokal, melainkan juga pada level global. Sehingga, pesat dan masifnya perkembangan teknologi dan globalisasi perlu diiringi dengan upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing. Revitalisasi Solo Technopark sebagai upaya dalam menjawab tantangan akibat perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan wujud dari aktualisasi konsep *discovery*. Walikota Gibran menilai bahwa pengembangan sumber daya manusia berkelas dunia perlu menjadi prioritas utama pembangunan. Hal tersebut direalisasikan secara konkret melalui kebijakan revitalisasi Solo Technopark sebagai bagian dari titik prioritas pembangunan di Kota Surakarta periode 2021- 2026.

Revitalisasi Solo Technopark sebagai upaya dalam menjawab tantangan akibat perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan wujud dari aktualisasi konsep *discovery*. Walikota Gibran menilai bahwa pengembangan sumber daya manusia berkelas dunia perlu menjadi prioritas utama pembangunan. Hal tersebut direalisasikan secara konkret melalui kebijakan revitalisasi Solo Technopark sebagai bagian dari titik prioritas pembangunan di Kota Surakarta periode 2021- 2026. Konsep *discovery* dalam cabang pemikiran kewirausahaan politik mengacu pada proses penciptaan, penyusunan, maupun penemuan gagasan atau solusi dari aktor politik dengan maksud untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Walikota Gibran melihat Solo Technopark sebagai potensi yang dapat menjawab tantangan tersebut. Akan tetapi, selama ini pemanfaatan infrastruktur dan program yang tersedia belum dijalankan secara maksimal. Sehingga, dampak dari hadirnya Solo Technopark belum dapat dirasakan secara maksimal pula bagi sebagian besar masyarakat Kota Surakarta. Oleh karena itu, aktualisasi *discovery* dalam praktik



kewirausahaan politik Walikota Gibran dijalankan melalui revitalisasi Solo Technopark dengan menyesuaikannya pada perkembangan global. Tujuannya tidak lain untuk menjadikan pusat inovasi dan vokasi ini sebagai wadah bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkelas dunia

Pada saat yang sama, hadirnya revitalisasi Solo Technopark di lain sisi mampu menjadi jalan keluar dan wadah bagi masyarakat terpinggirkan akibat masalah perekonomian yang menyebabkan mereka sulit mengakses bangku sekolah maupun bangku kuliah. Solo Technopark dalam hal ini memiliki peran sebagai pen jembatan untuk membuka peluang dan membawa harapan bagi masyarakat termarginalkan tersebut guna meraih kesuksesan tanpa harus menempuh jalur pendidikan secara formal. Melalui pelatihan yang dihadirkan Solo Technopark, masyarakat Kota Surakarta dapat terbantu dengan ruang-ruang tersebut serta terdorong untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh lewat penciptaan UMKM dan penyaluran tenaga kerja. Hal tersebut juga didukung dengan hadirnya potensi yang besar dalam mengembangkan *Start-up* kewirausahaan berbasis UMKM di Kota Surakarta. Sehingga, keberadaan Solo Technopark dapat menjadi jalan yang baik guna membantu masyarakat terpinggirkan di Kota Surakarta untuk terus maju dalam penguasaan sains dan teknologi.

### **Revitalisasi Solo Technopark dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Surakarta**

Kebijakan revitalisasi tidak semata-mata difokuskan pada perihal peremajaan gedung dan bangunan yang ada di Solo Technopark. Akan tetapi, revitalisasi lebih ditujukan pada perombakan program-program yang ditawarkan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan daya saing daerah. Berjalannya revitalisasi membawa kebaruan program yang mulanya hanya berfokus pada satu program, yakni manufaktur. Kemudian, bertambah menjadi 3 cluster program yang terdiri dari 9 sektor. Masing-masing cluster memiliki pelatihan tersendiri yang tentu telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan era teknologi. Adapun, kebaruan program pasca dijalankannya revitalisasi tersebut, diantaranya:

#### **Cluster Manufaktur**

- Sektor Mekanik dan Desain Manufaktur
- Sektor Pengelasan (*General and Underwater*)
- Sektor Otomasi

#### **Cluster Technopreneurship**

- Sektor Teknologi Informasi (ICT)
- Sektor Kewirausahaan (UMKM dan Start-Up)
- Sektor *Gaming* dan *E-Sport*

#### **Cluster Industri Kreatif**

- Sektor Seni Pertunjukan – Penyiaran
- Sektor Batik – Handicraft
- Sektor Kuliner

Selain itu, terdapat beberapa program penunjang sebagai bagian dari pelatihan sektor program di atas, seperti:

#### **Akselerasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Salah satu kelebihan dari Solo Technopark ialah mitra kerjasama perusahaan multinasional yang turut serta berkomitmen dalam upaya pengembangan sumber daya manusia berbasis bisnis. Upaya tersebut dijalankan dengan menggandeng perusahaan global Gojek dan Tokopedia dengan menghadirkan UMKM Center. Tujuannya guna memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM sekaligus mendorong mereka untuk dapat naik kelas.

### **Peningkatan Kompetensi *Entrepreneurship* dan Teknologi**

Program ini dijalankan sebagai upaya dalam menciptakan budaya inovatif, transfer teknologi, membangun semangat kewirausahaan, dan standar mutu untuk meningkatkan daya saing. Praktiknya diselenggarakan melalui adanya program bulanan yang turut menghadirkan *tenant* kewirausahaan, bisnis, dan inkubasi teknologi di Solo Trade Center, Solo Technopark. Tujuannya guna mendukung adanya pertumbuhan *start-up* maupun UMKM yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing.

### **Studi *Gaming***

Program ini dijalankan dengan menggandeng perusahaan pengembang *game* asal Singapura, Garena. Program diselenggarakan melalui pengenalan studi dan pelatihan dalam pengembangan *game*. Tujuannya untuk mendorong *creator-creator game* lokal menjadi produsen yang mampu bersaing dengan produknya. Hal itu juga didukung dengan hadirnya Game Working Space pertama di Indonesia sebagai hasil kolaborasi antara Acer Indonesia, ICE Institute, dan Solo Technopark.

Sebagai pusat vokasi dan inovasi di Kota Surakarta, Solo Technopark tidak hanya berperan sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan saja. Akan tetapi, Solo Technopark turut berupaya untuk menyalurkan peserta pelatihan pada industri-industri yang telah menjalin kerjasama dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini merupakan bentuk dari wujud tanggung jawab akan beban moral yang dimiliki Solo Technopark sebagai lembaga pelatihan kerja. Sehingga, para peserta pelatihan tidak hanya mendapat ilmu dan keterampilan yang mereka butuhkan. Melainkan juga turut terserap oleh industri berkaitan dengan latar belakang keterampilan yang mereka miliki. Revitalisasi dijalankan turut menjadi wujud dari transformasi Solo Technopark yang secara serius ingin bergerak ke arah sains dan teknologi. Khususnya, dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia pada UMKM dan bisnis berbasis teknologi. Bahkan, Solo Technopark dinilai layak untuk menjadi *role model* dalam pengembangan generasi muda lewat pelatihan kewirausahaan tanpa meninggalkan hadirnya teknologi sebagai alternatif tambahan. Hadirnya pengembangan Solo Technopark yang sesuai dengan arah perkembangan zaman dan teknologi ini tentu menjadi modal positif yang dimiliki kawasan Surakarta dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk bersaing.

### **Tanggapan Pengguna Fasilitas Solo Technopark terhadap Revitalisasi**

Praktik kewirausahaan politik Walikota Gibran melalui revitalisasi Solo Technopark ini mendapat banyak dukungan dan apresiasi dari masyarakat Kota Surakarta. Bentuk dukungan dan apresiasi ditunjukkan dengan tidak adanya hambatan dalam keberlangsungan proses revitalisasi Solo Technopark sejak dimulainya revitalisasi hingga selesai dan diresmikan. Selain itu, dukungan dari masyarakat Kota Surakarta juga termanifestasi dalam bentuk jumlah kunjungan serta kontribusi masyarakat untuk mengikuti program-program pelatihan yang ditawarkan oleh Solo Technopark. Berdasarkan data, setidaknya terdapat sejumlah 4.560 orang yang berkontribusi aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan di Solo Technopark pasca 6 bulan diresmikannya

revitalisasi. Dengan positifnya antusiasme masyarakat yang termanifestasi dalam jumlah kunjungan dan keikutsertaan pada program pelatihan, maka hal tersebut turut merepresentasikan hadirnya dukungan masyarakat Kota Surakarta terhadap revitalisasi Solo Technopark sebagai praktik dari kewirausahaan politik Walikota Surakarta.

Solo Technopark pasca revitalisasi mulai diarahkan sebagai sebuah wadah yang memiliki fungsi untuk berkolaborasi. Sehingga, fasilitas yang tersedia di Solo Technopark kini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa pun secara lebih mudah. Perubahan tersebut dirasakan oleh pengguna fasilitas Solo Technopark dan dinilai sebagai salah satu terobosan positif yang memberi dampak secara langsung. Berbagai program dan fasilitas yang ditawarkan pasca revitalisasi juga dinilai memuaskan oleh pengguna Solo Technopark dalam mendorong peningkatan kapasitas diri. Kebaruan fasilitas di Solo Technopark tidak hanya difokuskan pada sektor akademik dan pemusatan pelatihan kerja saja. Akan tetapi, fasilitas baru yang tersedia turut mewadahi sektor-sektor non-akademik dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia. Beberapa diantaranya ialah lapangan futsal dan basket yang difungsikan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia dalam sektor olahraga. Kemudian, terdapat *boulevard* air mancur sebagai area komunal terbuka untuk siapa pun yang ingin memanfaatkan ruang tersebut. Untuk menunjang kolaborasi, terdapat *Co-working space* yang dapat difungsikan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum untuk mendorong produktivitas serta inovasi. Area ini menjadi wadah yang berdampak baik bagi pengguna, khususnya mahasiswa dalam menjalin jejaring baru, relasi, dan berkolaborasi.

Kontribusi dan keikutsertaan generasi muda dalam memanfaatkan fasilitas di Solo Technopark tidak hanya membuktikan bahwa revitalisasi mampu mendukung terciptanya iklim produktif, melainkan juga menunjukkan bahwa kebaruan yang dihadirkan melalui revitalisasi telah sesuai dan tepat fungsi dengan kebutuhan generasi muda. Hadirnya kebermanfaatan yang berdampak secara langsung bagi masyarakat Kota Surakarta turut menjadi wujud dari tercapainya tujuan kewirausahaan politik, yaitu untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi publik. Di sisi lain, kewirausahaan politik turut memberikan keuntungan bagi aktor politik. Dalam hal ini, Walikota Gibran mendapat keuntungan berupa citra yang baik di kalangan pengguna fasilitas Solo Technopark. Citra yang baik merupakan keuntungan berharga bagi seorang politisi untuk mendapatkan hati masyarakat. Hal ini dapat menjadi bagian dari modal politik yang akan membantu seorang politisi untuk menghadapi kontestasi dalam percaturan politik di masa yang akan datang. Terlebih lagi, citra baik yang didapatkan Walikota Gibran mampu diiringi dengan kinerja yang memuaskan melalui program-program kerjanya sebagai orang nomor satu di Kota Surakarta. Tentu, hal ini memberikan keuntungan bagi Walikota Gibran secara popularitas bahkan elektabilitas.

Terlepas revitalisasi Solo Technopark mampu menghadirkan kebermanfaatan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terdapat beberapa kritik dalam pandangan ahli guna menyikapi dijalankannya program tersebut. *Pertama*, perlu adanya fokus pengembangan sumber daya manusia dari sisi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sehingga, melalui tiga kecerdasan ini akan lahir kesetaraan sosial di masyarakat. Hal itu penting untuk menjadi fokus bagi pemerintah Kota Surakarta, mengingat gempuran teknologi mulai memudahkan nilai-nilai kecerdasan tersebut. *Kedua*, hadirnya kebijakan-kebijakan berbasis pada perkembangan teknologi perlu diiringi dengan sisi humanisme, termasuk kebijakan revitalisasi Solo Technopark. Sehingga, kebijakan yang ditetapkan tidak menghilangkan adanya budaya luhur bangsa,

menjunjung tinggi toleransi, dan memuat implementasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Surakarta memiliki peran penting dalam merumuskan, menjalankan, serta mengawasi kebijakan dapat berjalan tepat tujuan tanpa menghilangkan nilai dan norma dari kearifan lokal. Dengan demikian, hadirnya revitalisasi Solo Technopark dapat menghindarkan masyarakat dari keterpurukan serta mampu mendorong terwujudnya cita-cita pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah.

### **Kesimpulan**

Revitalisasi Solo Technopark merupakan praktik kewirausahaan politik yang utuh dijalankan oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka, khususnya dilihat melalui kacamata cabang pemikiran *alertness and discovery* dalam perspektif kewirausahaan politik. Kebijakan revitalisasi Solo Technopark lahir karena kepekaan dari Walikota Gibran selaku aktor utama dalam melihat adanya peluang serta tantangan akibat perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin masif (*alertness*). Kepekaan Walikota Gibran dalam memetakan persoalan tersebut kemudian mendorong adanya gagasan untuk menghadirkan solusi sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan tersebut (*discovery*). Gagasan ini kemudian dimanifestasikan dalam rencana pembangunan prioritas di Kota Surakarta, yaitu melalui program revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Praktik kewirausahaan politik berupa revitalisasi ini mampu menghadirkan beragam kebaruan dari sisi program dan fasilitas di Solo Technopark. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh para pengguna fasilitas dan dinilai sebagai program yang tepat untuk menciptakan ekosistem pengembangan sumber daya manusia. Akibat yang dihasilkan dari hasil positif praktik kewirausahaan politik tersebut, Walikota Gibran turut menerima keuntungan berupa terbangunnya citra baik di kalangan para pengguna fasilitas Solo Technopark. Keuntungan tersebut merupakan salah satu modal politik yang berharga bagi Walikota Gibran dalam menghadapi percaturan politik di masa yang akan datang.

Penelitian ini memperluas teori kewirausahaan politik melalui dua perspektif teoritis. *Pertama*, keberhasilan dijalkannya praktik kewirausahaan politik mampu menghadirkan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara lebih luas apabila dipraktikkan pada level yang lebih tinggi. *Kedua*, keberhasilan praktik kewirausahaan politik pada level yang lebih tinggi akan turut memberikan keuntungan secara lebih besar bagi aktor kewirausahaan politik. Namun, keuntungan bagi aktor politik tersebut perlu diikuti dengan motif untuk memprioritaskan masyarakat daripada kepentingan pribadi dalam menjalankan praktik kewirausahaan politik. Temuan ini juga menunjukkan satu sisi karakteristik, bahwa praktik kewirausahaan politik yang dijalankan pada level lebih tinggi mampu menghasilkan keuntungan secara lebih besar bagi masyarakat sekaligus aktor politik. Penelitian terkait praktik kewirausahaan politik pada level yang lebih tinggi di Indonesia dengan menggunakan kacamata cabang pemikiran lain memiliki potensi yang tergolong masih besar. Oleh karenanya, tema ini membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk memperluas kajian terkait kewirausahaan politik di dalam ranah ilmu politik.

### **Daftar Pustaka**

Adimasurya, J. Z. (2018). Praktik Kewirausahaan Politik Kepala Desa (Studi Kasus Program "Lima Divisi Menuju Lingkungan Berkualitas") di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. (Tidak Diterbitkan).

*Kewirausahaan Politik Walikota Surakarta dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Revitalisasi Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark*

- AWY (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Pengguna Fasilitas Solo Technopark. Surakarta, 2023.
- Bariroh, L., & Fakhruddin, M. A. (2021). Political Entrepreneurship di Madura (Studi tentang Kuasa Aktor dalam Demokratisasi Lokal). *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11 (2); 136-166.
- YC (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Pemimpin BLUD Solo Technopark. Surakarta, 2023.
- Christopoulos, D., & Ingold, K. (2011). Distinguishing Between Political Brokerage & Political Entrepreneurship. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 10.
- Darmawan, F. H. (2019). KEWIRAUSAHAAN POLITIK DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI (Studi Kasus Praktik Kewirausahaan Politik Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. (Tidak Diterbitkan).
- DPR RI. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- DPRD Kota Surakarta. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
- DPRD Kota Surakarta. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.
- DPRD Kota Surakarta. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- François, A. (2003). The Political Entrepreneur and The Coordination of The Political Process: A Market Process Perspective of The Political Market. *The Review of Austrian Economics*, 16 (2-3): 153-158.
- IH (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Pengguna Fasilitas Solo Technopark. Surakarta, 2023.
- K (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Pengguna Fasilitas Solo Technopark. Surakarta, 2023.
- DK (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Ahli Bidang Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Surakarta, 2023.
- McCaffrey, M., & Salerno, J. T. (2011). A Theory of Political Entrepreneurship. *Modern Economy*, 2 (4): 552-560. DOI:10.4236/me.2011.24061
- Mintardjo, C. M., Ogi, I. W., Kawung, G. M., & Raintung, M. C. (2020). Sejarah Teori Kewirausahaan: Dari Saudagar Sampai ke Teknoprenur Startup. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7 (1).
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026.
- Rokhmat, D., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2023). Perbandingan Kolaborasi Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Unit Pelaksana Teknis menjadi Badan Layanan Umum (Studi di UPTD Cimahi Techno Park dan UPTD Solo Techno Park Tahun 2021). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 6 (1), 39-58.
- Ruhana, I. (2012). Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia vs Daya Saing Global. *PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6 (1): 50-56.
- Sobari, W. (2019). The Practice of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese Village. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23 (1): 30-44. <https://doi.org/10.22146/jsp.38420>

TO (Inisial). Wawancara dengan Narasumber: Pengguna Fasilitas Solo Technopark.  
Surakarta, 2023.